

Konstruksi Sosial Ideologi Keagamaan dalam Sistem Pertahanan Sosial: Studi Sosiologi Pertahanan di Madura

Kuntum Chairum Ummah¹, Agustinus Gergorius Raja Dasion² Aminah Dewi Rahmawati³

^{1,2,3}Universitas Trunodjoyo Madura (Sosiologi, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia)

*Email koresponden: kuntum.ummah@trunodjoyo.ac.id

ARTIKEL INFO

Article history

Received: 10 April 2026

Accepted: 20 April 2026

Published: 30 April 2026

Kata kunci:

Social Construction,
Religious Ideology,
National Defence,
Madura,
Social Defence,

ABSTRACT

This study examines how religious ideology is socially constructed in shaping a social defense system grounded in national defense within the Madurese community. In this context, strong religious values function not only as spiritual guidance but also as the basis for social norms, collective identity, and communal awareness in responding to both military and non-military threats. Using a qualitative approach, this research was conducted in Pamekasan Subdistrict, Madura, East Java, through observation, in-depth interviews, literature review, and Focus Group Discussions (FGDs) involving relevant stakeholders. Data were collected through non-participant observation, genealogical studies, and literature analysis, and were analyzed using qualitative descriptive methods. The study applies the Social Construction of Reality framework, focusing on the processes of externalization, objectification, and internalization. The findings reveal that religious values are continuously produced and reproduced through the roles of kiai, pesantren, and local traditions such as slametan and haul, which have undergone strong institutionalization and become collectively accepted social realities. These values are internalized by individuals, forming a religious habitus that fosters a sense of national defense as a moral and religious obligation. The study concludes that the integration of religious values and national defense generates a cultural and ideological form of social defense that strengthens national resilience from within society. In this context, national defense is understood not only as a physical effort but also as a social practice rooted in spirituality, social solidarity, and collective responsibility. This research contributes to the sociology of defense and offers practical insights for developing national defense awareness programs based on local wisdom and religious values. The role of non-state actors as strategic elements in building social and cultural-based national resilience is the focus of this research.



© 2025 by authors. Lisensi Ummul Qura : Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license.

1. PENDAHULUAN

Kondisi keagamaan di Madura sangat kuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Mayoritas penduduk Madura menganut agama Islam, dan nilai-nilai keislaman begitu mendalam mewarnai pola pikir, budaya, serta struktur sosial mereka. Kehidupan keagamaan masyarakat Madura ditandai dengan tingginya tingkat ketaatan beribadah, penghormatan terhadap ajaran agama, dan peran sentral para kiai serta

pesantren dalam membimbing kehidupan spiritual dan sosial. Pesantren-pesantren tradisional tersebar luas di berbagai pelosok Madura dan menjadi pusat pendidikan agama yang berpengaruh besar. Tradisi-tradisi lokal seperti slametan, haul, dan ziarah makam tokoh agama juga menunjukkan akulturasi antara Islam dan budaya lokal yang khas. Selain itu, agama memiliki peran penting dalam membentuk norma dan etika masyarakat, bahkan menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan sosial. Dengan demikian, agama di Madura tidak hanya menjadi urusan spiritual, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam membentuk identitas dan kehidupan bermasyarakat yang mengandung arti bahwa terdapat kepercayaan dan kewajiban mempertahankan wilayah sendiri dari ancaman militer maupun ancaman non militer yang menjadi dasar keyakinan keagamaan bagi masyarakat Madura.

Kuatnya internalisasi nilai keagamaan berpotensi menjadi sumber daya sosial yang signifikan dalam membangun solidaritas, kepatuhan, dan mobilisasi sosial. Namun di sisi lain, belum jelas bagaimana nilai-nilai tersebut dikonstruksi, dinegosiasikan, dan diarahkan oleh aktor non-negara untuk merespons berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer. Ketiadaan kajian yang secara spesifik menempatkan kiai dan pesantren sebagai agen dalam sistem pertahanan sosial menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai bagaimana kekuatan kultural-religius dapat bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan berbasis masyarakat. Dengan demikian, permasalahan utama penelitian ini terletak pada bagaimana peran aktor non-negara seperti ulama dan kiyai dalam mengonstruksi, mereproduksi, dan menginternalisasi ideologi keagamaan sehingga dapat berfungsi sebagai basis pembentukan sistem pertahanan sosial dalam masyarakat Madura.

Peran serta warga negara dalam Bela Negara telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara dimana Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Penjabaran lebih lanjut tentang hak dan kewajiban dalam pembelaan negara, tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi Pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sishanta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional. Peran warga dalam bela negara sangat penting sebagai wujud nyata dari rasa cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui angkat senjata, tetapi juga dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menjaga persatuan, taat pada hukum, aktif dalam kegiatan sosial, hingga berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan profesi masing-masing. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara, baik dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer seperti ancaman ideologi, budaya, dan ekonomi. Melalui pendidikan, kedisiplinan, serta semangat gotong royong, warga negara dapat menjadi kekuatan moral dan sosial dalam menciptakan stabilitas dan ketahanan nasional. Dengan peran aktif seluruh masyarakat, upaya bela negara akan menjadi lebih kuat, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Integrasi nilai-nilai keagamaan dengan Kesadaran Bela Negara merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk membangun daya tangkal, guna memperkokoh pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dan gangguan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Karena pada dasarnya Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)

ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap, mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal Bela Negara, baik secara fisik maupun mental. Agama sebagai panduan spiritual memiliki peran penting dalam membentuk semangat dan landasan moral dalam upaya bela negara. Nilai-nilai keagamaan seperti keikhlasan, pengorbanan, kejujuran, dan cinta sesama menjadi kekuatan batin yang mendorong seseorang untuk berbuat demi kebaikan bangsa dan negara. Dalam banyak ajaran agama, membela kebenaran, menjaga keadilan, serta melindungi sesama merupakan bagian dari ibadah dan bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Fenomena menguatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat Madura menjadi isu penting dalam kajian sosial, khususnya dalam kaitannya dengan sistem pertahanan sosial berbasis bela negara. Realitas sosial menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga menjadi landasan dalam membentuk norma sosial, solidaritas kolektif, dan mekanisme pertahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Di Pamekasan, praktik sosial seperti peran kiai, keberadaan pesantren, serta tradisi lokal seperti *slametan* dan *haul* menunjukkan bagaimana nilai keagamaan berkelindan dengan kehidupan sosial sehari-hari dan berkontribusi dalam membangun ketahanan sosial masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara agama dan struktur sosial. Misalnya, Peter L. Berger menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Sementara itu, Clifford Geertz dalam studinya tentang agama di Jawa menekankan pentingnya simbol dan makna dalam praktik keagamaan masyarakat. Penelitian lain juga menyoroti peran pesantren dalam membentuk moralitas sosial dan kohesi komunitas. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek budaya dan keagamaan secara umum, dan belum secara spesifik mengaitkannya dengan konsep pertahanan sosial dan bela negara. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini tidak hanya melihat agama sebagai sistem nilai atau praktik budaya, tetapi juga sebagai kekuatan ideologis yang berperan dalam membentuk kesadaran bela negara. Studi ini mengintegrasikan perspektif sosiologi agama dengan sosiologi pertahanan untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat berkontribusi dalam membangun sistem pertahanan sosial berbasis masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang menghubungkan dimensi religius dengan aspek ketahanan nasional.

Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi sosial ideologi keagamaan di masyarakat Madura menghasilkan habitus religius yang mendorong lahirnya kesadaran bela negara sebagai kewajiban moral dan kolektif. Integrasi antara nilai keagamaan dan semangat nasionalisme ini membentuk suatu sistem pertahanan sosial yang bersifat kultural dan ideologis, yang pada akhirnya berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional dari dalam masyarakat itu sendiri. Praktik keagamaan masyarakat Madura juga memperlihatkan adanya proses akulturasi yang khas antara ajaran Islam dengan tradisi lokal, seperti dalam ritual *slametan*, *haul*, dan ziarah makam tokoh agama. Tradisi-tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat solidaritas, kohesi komunitas, dan kontinuitas nilai-nilai kolektif. Dalam konteks ini, agama

berperan sebagai sumber legitimasi utama dalam pembentukan norma, etika, dan aturan sosial, bahkan menjadi rujukan sentral dalam penyelesaian konflik serta pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, agama di Madura tidak dapat dipisahkan dari konstruksi identitas sosial masyarakat, melainkan menjadi fondasi utama yang membentuk cara pandang, orientasi tindakan, serta sistem nilai yang mengatur kehidupan kolektif.

2. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mempermudah memahami pola integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan mendekati data dengan melihat pengalaman dalam rangka memahami perilaku sosial di masyarakat Madura. Dengan melihat pengalaman tersebut maka peneliti mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Model analisa dapat menjelaskan keadaan dan kondisi yang berlangsung serta gejala penting yang saling berhubungan antara nilai-nilai keagamaan dengan faktor yang lainnya pada aspek yang diteliti seperti sistem pertahanan rakyat semesta, sistem total dan bela negara. Pengumpulan data dilakukan melalui proses kajian kepustakaan, observasi, *depth interview* dan *focus group discussion* (FGD). FGD dilakukan sebagai langkah untuk melakukan pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui diskusi kelompok kecil untuk menggali pendapat, pandangan, persepsi, dan pengalaman peserta masyarakat Madura tentang nilai-nilai keagamaan dan keterkaitannya dengan kegiatan bela negara.

Lokasi Penelitian di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan-Madura (Jawa Timur). Pada penelitian ini, data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan; penelitian lapangan berupa observasi non partisipan dan kajian genealogi di Kecamatan Pamekasan dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* terkait. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Melalui analisis deskriptif peneliti memberikan gambaran atau paparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan memperlakukan obyek berdasarkan kategori tertentu, kategori tersebut bertujuan untuk menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian diklasifikasikan secara yuridis dan sistematis. Tahapan analisis data dalam penelitian, yaitu: (1) bahan atau fakta disistematisasi atau ditata dan disesuaikan dengan objek yang diteliti; (2) Bahan atau fakta yang telah disistematisasi, kemudian diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori; (3) Bahan yang telah diuraikan kemudian dievaluasi. Pada tahap ini dilakukan beberapa aktivitas seperti mengumpulkan dan mengkaji data-data sekunder serta pemetaan hasil *depth interview* dengan narasumber dan hasil *focus group discussion* (FGD) dengan stakeholder. (4) Langkah tersebut dilakukan untuk memahami fokus penelitian secara mendalam dan komprehensif serta menyusunnya dalam laporan hasil penelitian secara sistematis.

Penelitian ini melibatkan informan kunci yang terdiri dari ulama dan pengurus di masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan, Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, tokoh masyarakat seperti ikatan masjid nurul iman Kabupaten Pamekasan, aparat desa Kecamatan Pamekasan, Ikatan Remaja masjid, pengelola masjid dan masyarakat umum di wilayah Pamekasan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan

mempertimbangkan posisi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam aktivitas keagamaan dan sosial untuk menjangkau jaringan sosial yang lebih luas dan relevan. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi dan proses FGD dengan pemuda dan masyarakat di Pamekasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil:

3.1 Nilai Keagamaan Kolektif dalam Praktik Sosial

Internalisasi nilai-nilai keagamaan berimplikasi pada munculnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga dan mempertahankan eksistensi komunitas, baik dari ancaman yang bersifat militer maupun non-militer. Dalam hal ini, nilai-nilai keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai basis ideologis yang mendorong terbentuknya etos bela diri komunitas yang dapat dipahami sebagai bentuk pertahanan sosial berbasis keagamaan. Dalam analisis sosiologis untuk melihat keterkaitan antara pertahanan bangsa yang berbasis keagamaan di Madura melalui Pendekatan Konstruksi Sosial, dapat dipahami bahwa realitas keagamaan di Madura sebagai hasil dari proses dialektis antara individu dan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus melalui tiga tahapan utama yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai keagamaan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang berlangsung melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui proses ini, nilai agama tidak hanya menjadi keyakinan personal, tetapi berubah menjadi realitas sosial yang mengikat dan menjadi kesadaran kolektif untuk bersama-sama menjaga ikatan tersebut. Ikatan tersebut dijaga karena terkait pentingnya menjaga keberlangsungan komunitas dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bersama. Kesadaran ini tercermin dalam sikap solidaritas sosial, kepatuhan terhadap norma, serta kesiapan untuk menjaga lingkungan sosial dari gangguan eksternal maupun internal.

3.2 Proses Sosialisasi dan Pembentukan Kesadaran Individu

Penelitian ini menunjukkan bahwa individu di Madura sejak usia dini telah terpapar nilai-nilai keagamaan melalui keluarga, pesantren, dan lingkungan sosial. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun informal. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipraktikkan secara ritual, tetapi juga membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap **eksternalisasi**, masyarakat Madura secara aktif mengekspresikan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai praktik sosial dan budaya, seperti kegiatan pesantren, ritual keagamaan, serta tradisi lokal yang bernuansa Islam. Nilai-nilai tersebut “dikeluarkan” ke ruang sosial dan menjadi bagian dari tindakan kolektif yang berulang. Dalam tahap ini, peran kiai dan pesantren menjadi sangat penting sebagai agen yang memproduksi dan menyebarkan makna keagamaan ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

Data menunjukkan bahwa masyarakat Madura secara aktif mengekspresikan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai praktik sosial seperti kegiatan pesantren, ritual keagamaan, serta tradisi lokal bernuansa Islam. Praktik-praktik ini dilakukan secara berulang dan melibatkan

partisipasi kolektif masyarakat lintas generasi. Tahapan **objektivasi** dapat terlihat dalam praktik-praktik keagamaan yang terus direproduksi tersebut mengalami proses pelembagaan (institusionalisasi) sehingga tampak sebagai realitas yang objektif melalui norma-norma religius, otoritas kiai, serta tradisi keagamaan yang mengakar kuat dan diterima sebagai realita dan kenyataan sosial yang sah serta mengikat. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga institusi sosial yang melegitimasi struktur kekuasaan simbolik berbasis agama dan tahap terakhir adalah **internalisasi** di mana individu sejak kecil menyerap nilai-nilai keagamaan tersebut melalui proses sosialisasi, baik di lingkungan keluarga, pesantren, maupun masyarakat luas.

Nilai-nilai keagamaan yang bersifat kolektif ini kemudian membentuk kesadaran subjektif individu, sehingga mereka tidak hanya menjalankan ajaran agama secara normatif, tetapi juga meyakini sebagai kebenaran yang inheren dalam dirinya. Di sinilah terbentuk habitus keagamaan yang kuat, yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak masyarakat Madura. Dalam kerangka ini, kesadaran untuk mempertahankan wilayah atau komunitas dari berbagai ancaman dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang berakar pada internalisasi nilai-nilai keagamaan. Bela negara tidak semata dimaknai sebagai konsep politik atau militer, tetapi sebagai bagian dari kewajiban moral-religius yang dilegitimasi oleh ajaran agama dan diperkuat melalui struktur sosial yang ada. Dengan demikian, sistem pertahanan sosial di Madura merupakan produk dari konstruksi sosial keagamaan yang telah mengakar kuat dan direproduksi secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat.

Pembahasan:

3.3 Peran Aktor non-negara dalam Pertahanan Nasional

Sistem pertahanan sosial bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengandung dimensi keimanan dan rohani yang mendalam. Dengan menjadikan agama sebagai pedoman, warga negara akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk bertanggung jawab, menjunjung persatuan, serta menolak segala bentuk ancaman yang dapat merusak keharmonisan dan kedaulatan bangsa. Ajaran agama dalam konteks ini, menjadi sumber motivasi luhur dalam memperkuat jiwa nasionalisme dan membangun pertahanan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Pembentukan kesadaran akan Bela Negara merupakan wujud pembinaan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga terhadap SDM di lingkungan masing-masing dan pembinaan terhadap SDM di luar lingkungan Kementerian/Lembaga yang menjadi objek dalam program kegiatan Kementerian dan Lembaga terkait.

Penggunaan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Berger menjadi landasan penting dalam memahami realitas sosial yang dibentuk melalui proses interaksi antarindividu. Menurut Berger, realitas sosial tidak hadir secara alami, melainkan merupakan hasil dari proses dialektika yang terdiri atas tiga tahap: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merujuk pada proses ketika individu mengekspresikan diri dan menciptakan struktur sosial melalui aktivitas sosial; objektivasi terjadi ketika hasil dari proses tersebut dianggap sebagai kenyataan yang berdiri sendiri dan diterima secara kolektif; sedangkan internalisasi adalah tahap ketika individu menerima dan menjadikan realitas sosial tersebut

sebagai bagian dari kesadarannya. Dalam konteks penelitian ini, teori konstruksi sosial Berger relevan untuk menganalisis bagaimana nilai, norma, atau identitas sosial yang didalamnya saling berkaitan dengan agama, budaya, dan nasionalisme bisa dibentuk, disebarkan, dan dimaknai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali suatu pemahaman kolektif didalam masyarakat menjadi berkembang dan melembaga didalam masyarakat Madura.

Institusi militer merupakan institusi yang dibutuhkan dalam suatu sistem sosial untuk dapat melindungi kedaulatan bangsa dan negara, melindungi seluruh warga negara. Jika tidak terdapat institusi sipil maka tidak ada objek yang nyata untuk dilindungi oleh militer. Dalam hal ini terlihat bahwa antara institusi militer dengan institusi lainnya saling membutuhkan. Hubungan yang saling menyatu (terkait) dan menuju kepada tujuan bersama ini merupakan cara pandang teori sistem. Militer dalam kajian sosiologi menjadi institusi tersendiri dalam sistem sosial dimana militer sebagai sebuah institusi memiliki nilai, tujuan, metode, organisasi yang khas dibandingkan dengan institusi lain. Oleh karena itu, dalam melihat pola hubungan sipil dengan militer memerlukan sudut pandang dan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan institusi sipil lainnya. Terutama kader sipil bela negara yang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Bangsa.

Kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gatut Priyowidodo menemukan bahwa Demokrasi harus menghargai perbedaan dan hal ini merupakan fondasi awal dalam sistem pertahanan total. Dikarenakan letak geografis bangsa Indonesia yang luas dan sumber daya manusia yang besar juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Terdapat empat persoalan bangsa Indonesia yang meliputi ideologi, identitas, budaya dan arah ekonomi. Untuk itu diperlukan proses pengambilan keputusan yang dipimpin dan sesuai dengan arah kebijakan ideologi negara. Penelitian terdahulu yang juga terkait dengan fenomena Bela Negara menemukan bahwa kegiatan bela negara identik dengan anggapan bahwa kegiatan ini haruslah memiliki kondisi fisik yang kuat dan berani seperti penelitian tentang Pendidikan Bela Negara dalam Membangun Kesadaran Kewarganegaraan peran penting Pendidikan Bela Negara dalam membangun kesadaran kewarganegaraan di kalangan generasi muda, Pendidikan Bela Negara sendiri memiliki fungsi dalam membentuk identitas nasional, memperkuat rasa cinta tanah air, dan meningkatkan pemahaman tentang kegiatan dan ideologi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di Indonesia. Kebutuhan sumber daya manusia Indonesia dalam sistem pertahanan total memiliki makna bahwa terdapat sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan pada kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam sistem pertahanan total. Sifat pemberani dan menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan sangat terasa kental dalam keluarga suku Madura. Suku Madura terkenal sebagai suku yang sangat menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada adat istiadatnya, memiliki spiritualitas tinggi khususnya ajaran agama islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Madura.

Diantara penelitian terdahulu yang pernah terpublikasikan adalah riset yang dilakukan oleh Asep Dahliyana yang berfokus pada Pendidikan pendahuluan bela negara di perguruan

tinggi melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai wahana untuk meminimalisir berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan bagi negara Indonesia. Penelitian lainnya terkait dengan Ketahanan Bangsa adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Lemhannas yang berkaitan dengan evaluasi Industri Pertahanan Negara dalam rangka kemandirian alutsista yang ditulis oleh Herma Yudhi Irwanto yang menemukan bahwa kemandirian alutsista nasional dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan nasional merupakan kunci untuk menciptakan kemandirian bangsa dimana pengadaan alutsista dapat menjadi bagian yang dapat mengembangkan industri dalam negeri.

3.4 Integrasi Nilai Agama dengan Kegiatan Pertahanan

Internalisasi nilai keagamaan menghasilkan habitus yang memengaruhi cara individu memahami kewajiban sosialnya. Bela negara dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai bagian dari kesadaran moral dan religius yang melekat dalam diri individu. Nilai-nilai keagamaan mengalami transformasi dari sekadar pedoman moral menjadi basis ideologis dalam membangun sistem pertahanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga kultural dan spiritual. Dalam perspektif sosiologis, sistem pertahanan tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas. Hubungan antara masyarakat sipil (melalui aktor keagamaan) dan institusi pertahanan formal bersifat saling melengkapi dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

Integrasi nilai agama dengan kegiatan pertahanan merupakan pendekatan strategis yang menggabungkan aspek spiritual dan moral ke dalam sistem keamanan dan pertahanan negara. Pendekatan ini penting karena dapat memperkuat ketahanan moral masyarakat, meningkatkan loyalitas dan semangat juang, serta menciptakan pertahanan yang juga kokoh secara etika dan ideologi. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai keagamaan dan sikap Bela Negara dianggap sebagai instrumen penting dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang kuat dan diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan bela negara. Penelitian lainnya terkait dengan relevansi Pendidikan agama dan bela sebagai tekad bersama untuk menjaga, merawat Negara kesatuan dari bentuk ancaman dan gangguan dalam bentuk apapun, dari perang fisik sampai ideologis. Dengan ditetapkannya Pancasila dan UUD 45 sebagai ideologi Negara Indonesia, maka Pancasila juga bertujuan untuk menjadi filter dari ideologi luar masuk pada sistem demokrasi di Indonesia dan juga sebagai pedoman ketika mengalami tantangan dari perubahan zaman.

4. KESIMPULAN

Bela negara merupakan komitmen akan sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga serta mempertahankan keutuhan, kedaulatan, dan eksistensi negara. Konsep ini tidak terbatas pada aspek pertahanan fisik semata, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan moral yang berperan penting dalam pembentukan identitas nasional. Pendidikan bela

negara memiliki fungsi strategis dalam menanamkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa, serta tanggung jawab sosial warga negara. Melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal, masyarakat dibekali pemahaman mengenai sejarah, kebudayaan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, implementasi bela negara tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti menjaga stabilitas keamanan, melestarikan budaya, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial.

Keberhasilan suatu pendidikan bela negara dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, serta partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau institusi militer, tetapi merupakan kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa. Bela negara merupakan manifestasi dari rasa cinta dan komitmen individu terhadap negara yang perlu terus dipupuk dan dikembangkan, khususnya di kalangan generasi muda, agar masyarakat Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi tantangan global serta mampu mempertahankan kedaulatan dan identitas nasional.

Penerapan nilai-nilai serta budaya lokal Madura dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun *soft power* bela negara yang berlandaskan moralitas dan spiritualitas. Melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan seperti keikhlasan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial, masyarakat Madura tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga menciptakan harmoni sosial di dalam negeri serta mempererat hubungan dengan bangsa lain. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa bela negara tidak semata-mata bersifat fisik atau militeristik, melainkan juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan religius yang berperan penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Pada konteks keagamaan di Madura, bela negara dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah sosial, di mana setiap tindakan untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa menjadi wujud pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan pengorbanan yang diajarkan oleh agama sejalan dengan semangat bela negara yang menuntut dedikasi dan cinta tanah air. Dengan demikian, ajaran agama menjadi landasan moral yang memperkuat motivasi masyarakat untuk berkontribusi bagi bangsa secara damai dan beradab.

Pendidikan bela negara, bila dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan, berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran spiritual kebangsaan. Melalui pendidikan formal, non-formal, maupun kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian, bakti sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, masyarakat diajarkan untuk menghargai sejarah, budaya, serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Aktivitas sosial dan keagamaan ini tidak hanya memperkuat solidaritas di antara masyarakat Madura, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter yang berorientasi pada tanggung jawab moral dan nasional.

Keberhasilan bela negara yang berbasis nilai-nilai agama dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga persatuan, keadilan, dan

kepedulian sosial. Partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, pelestarian budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan mencerminkan manifestasi nyata dari nilai religius yang selaras dengan semangat bela negara. Oleh karena itu, bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau militer, tetapi merupakan amanah moral dan spiritual seluruh warga negara. Dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam praktik bela negara, bangsa Indonesia diharapkan mampu membangun ketahanan moral dan sosial yang tangguh dalam menghadapi tantangan global. Sinergi antara keimanan, kebudayaan lokal, dan semangat kebangsaan akan menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, serta martabat bangsa Indonesia di tengah dinamika dunia yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Emile Durkheim. (1912). *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press.
- Clifford Geertz. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Pierre Bourdieu. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Anthony Giddens. (1984). *The Constitution of Society*. Berkeley: University of California Press.
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Lemhannas RI. (2018). *Ketahanan Nasional dan Bela Negara*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Priowidodo, G. (2019). Demokrasi dan sistem pertahanan total di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 123–135.
- Dahliyana, A. (2020). Pendidikan pendahuluan bela negara di perguruan tinggi melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 45–56.
- Irwanto, H. Y. (2021). Kemandirian industri pertahanan dalam mendukung ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), 201–215.
- Ansori, H. (2022). Integrasi nilai bela negara dalam pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 89–102.